

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak lahirnya Konvensi Internasional dalam Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992 di Brazil, Brazil sukses menjadi pelopor dalam kebijakan perubahan iklim dan diplomasi lingkungan (Escobar, 2019). Presiden Brazil pada saat itu, Fernando Collor de Mello menjadikan kebijakan terkait lingkungan sebagai prioritas utama. Kondisi tersebut membentuk identitas Brazil sebagai pelopor di bidang lingkungan (Feeney, 1992). Dengan konsumsi terhadap energi terbarukan yang lebih banyak daripada energi yang lain, serta dengan pengembangan sistem perlindungan lingkungan mulai dari tahun 1980an membuat para ilmuwan di dunia menobatkan Brazil sebagai “*frontrunner*” atau contoh negara yang terkemuka dalam bidang lingkungan (Viscidi, 2019).

Namun, warisan identitas Brazil sebagai negara pelopor di bidang lingkungan tersebut sekarang sedang terancam. Semenjak kampanye, Jair Bolsonaro beberapa kali melontarkan pernyataan untuk menarik Brazil keluar dari Paris Agreement. Bahkan, sebelum memulai masa jabatannya, Bolsonaro menarik mundur Brazil dari tawaran PBB untuk menjadi tuan rumah dari Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa 2019, yang pada akhirnya dilaksanakan di Madrid, Spanyol pada tanggal 2-13 Desember 2019 (Escobar, 2019). Kemudian, sejak mulai menjabat pada 1 Januari 2019, Bolsonaro telah membongkar beberapa divisi pemerintah yang didedikasikan untuk perubahan iklim (Escobar, 2019). Dikutip dari Science Magazine, ditemukan fakta yang mengherankan bahwa

kabinet Bolsonaro tidak menggunakan data ilmiah ataupun teori yang terdistorsi untuk menjustifikasi keraguan mereka terkait realitas pemanasan global yang disebut-sebut menjadi alasan utama keraguan Bolsonaro untuk memprioritaskan kebijakan lingkungan (Science Magazine, 2021).

Disamping itu, kabinet Bolsonaro membingkai perubahan iklim yang terjadi sebagai bagian dari perang ideologis antara pihak kiri dan pihak kanan, atau antara agenda globalis dan kedaulatan Brazil (Escobar, 2019). Menteri luar negeri Brazil yang baru, Ernesto Araújo, menuliskan bahwa pemanasan global adalah "dogma" sayap kiri, yang digunakan untuk "mencekik pertumbuhan ekonomi kapitalis dari negara-negara demokratis" (Escobar, 2019). Kementerian Araújo juga telah menghilangkan Divisi Perubahan Iklim yang sebenarnya merupakan pelopor utama eksistensi Brazil di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya. Semua kebijakan lingkungan sekarang berada di bawah satu departemen, dan kata "iklim" telah menghilang dari struktur administrasi kementerian. Dua departemen, yaitu departemen dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani perubahan iklim dan kebijakan mitigasi juga dibatalkan, bersamaan dengan satu departemen yang dikhususkan untuk memerangi deforestasi di Brazil (Araujo et al, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, yang turut membahas tentang kebijakan lingkungan Brazil setelah Bolsonaro menjabat. Fearnside (2019) menyatakan bahwa penyebab dari perubahan kebijakan tersebut adalah faktor personal (idiosinkratisme) dari Bolsonaro sendiri yang berpengaruh terhadap agenda kabinetnya. Velho (2019) dalam penelitiannya yang memuat

paparan terkait kebijakan lingkungan di Hutan Amazon pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Velho dalam penelitiannya mengusulkan pendekatan tiga langkah. Pertama, penjabaran terkait kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di Amazon dan langkah-langkah pemerintah untuk memberantasnya; Kedua, peran suku-suku asli dalam pemeliharaan hutan dan dampak perubahan peraturan lingkungan terhadap pengertian wilayah kelompok tersebut. Terakhir, analisis peran entitas internasional dalam pelestarian hutan dan proses integrasi.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebanyakan penulis hanya membahas terkait fenomena-fenomena yang mengindikasikan kecenderungan Bolsonaro untuk tidak lagi memprioritaskan kebijakan lingkungan selama pemerintahannya di Brazil. Memang hanya terdapat sedikit analisis terkait faktor yang menyebabkan sikap Bolsonaro tersebut, misalnya faktor idiosinkratisme, atau faktor orientasi pemerintah (kabinet), namun masih belum ada penelitian yang dapat menelaah motif utama dari perubahan kebijakan oleh Bolsonaro tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang menjelaskan terkait ketidakkonsistenan sikap Bolsonaro terkait beberapa pernyataan yang dilontarkannya dan kebijakan yang diambilnya. Sikap tersebut sangat manipulatif, dan mendorong berbagai kecurigaan atas motif utama dari perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Bolsonaro tersebut. Maka dari itu, penulis akan mengulas lebih dalam untuk menemukan alasan atas kemanipulatifan sikap Bolsonaro, dan motif utama dari upaya penarikan Brazil terhadap *Paris Agreement* di bawah pemerintahan Bolsonaro ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengapa Brazil di era pemerintahan Jair Bolsonaro mengubah orientasi kebijakan luar negeri Brazil dari *environmentalist* menjadi *economy and development oriented*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari faktor utama penyebab perubahan orientasi kebijakan lingkungan di era Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan kecenderungan Brazil untuk tidak dapat memenuhi kesepakatan dan “seperti” akan menarik diri *Paris Agreement* melalui pendekatan teori kebijakan Hermann.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian materi ilmu Hubungan Internasional, terutama pada sub-materi mengenai Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*) dan Studi Lingkungan. Dimana penelitian ini memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang *Foreign Policy Change* dalam lingkup Studi Lingkungan dengan faktor-faktor yang di analisis melalui teori Hermann.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mengambil manfaat lain yaitu kita dapat memprediksi sikap dan posisi Brazil dalam kesepakatan *Paris Agreement* di masa yang akan mendatang, dengan melihat dari kecenderungan-kecenderungan yang tercipta dari kebijakan yang dibuat oleh presidennya, Jair Bolsonaro. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan penjabaran yang jelas terkait perubahan kebijakan yang terjadi dan bagaimana respon dunia terhadap perubahan kebijakan tersebut, agar dapat menjadi cerminan/ccontoh bagi pemerintah di negara kita sendiri. Sehingga, pemerintah dapat lebih berhati-hati atau tidak terlalu ekstrem dalam mengambil atau mengubah suatu kebijakan, terutama kebijakan yang sifatnya internasional yang berdampak pada negara lain atau khalayak banyak. Karena, sekali salah langkah dalam pengambilan kebijakan internasional, selain akan menuai kontroversi, juga akan menuai kecaman dari berbagai pihak, yang mana akan berdampak pada berkurangnya hubungan baik antarnegara dalam hal diplomatik.

1.5 Kerangka Teori

Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*) merupakan bagian dari kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) yang menekankan kepada berbagai teknik, perspektif teoritis, pendekatan integratif, tingkat analisis bertingkat dan eksplanasi mengenai berbagai penyebab terjadinya keanekaragaman dalam kebijakan luar negeri. Salah satu basis konseptual dari studi Perubahan Kebijakan Luar Negeri ini dikembangkan oleh Rosenau pada tahun

1970-an. Rosenau menyusun kerangka studi kebijakan luar negeri yang disebut *Linkage Theory* (Rosenau, 1971). Konsep *Linkage Theory* ini mengaitkan antara dua sistem, yakni sistem nasional dan sistem internasional dalam suatu negara. Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Oleh karenanya untuk menganalisis bagaimanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan *teori linkage* yang dikemukakan James N. Rosenau. Di samping faktor politik domestik dan eksternal internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu decision-maker seperti Kepala Negaraal Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya.

Lebih lanjut konsep Perubahan Kebijakan Luar Negeri ini juga dikaji secara mendalam oleh Gustavsoon (1999) yang merangkum adanya lima model (Gustavsson, 1999). Perubahan Kebijakan Luar Negeri dari berbagai ahli Kelima model tersebut yaitu: Model yang dikembangkan oleh Holsti (1982) tentang restrukturisasi kebijakan luar negeri; Goldmann (1988) model stabilisator di dalam sistem pengambilan keputusan; Hermann (1990) model sistem sibermetik dalam pengambilan kebijakan sebagai variable antara; Walter Carlsnaes (1992) model diakronis interaksi antara agensi dan struktur; model Skidmore yang menjelaskan perubahan dikondisikan oleh kondisi dalam negeri dan kekuatan eksternal; dan model Rosati (1994) mengenai periode stabilitas yang berhasil oleh periode transisi (Gustavsson, 1999). Konsep perubahan kebijakan luar negeri dari sejumlah ahli ini

menunjukkan berbagai variasi pendekatan dalam menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri di suatu negara dapat berubah.

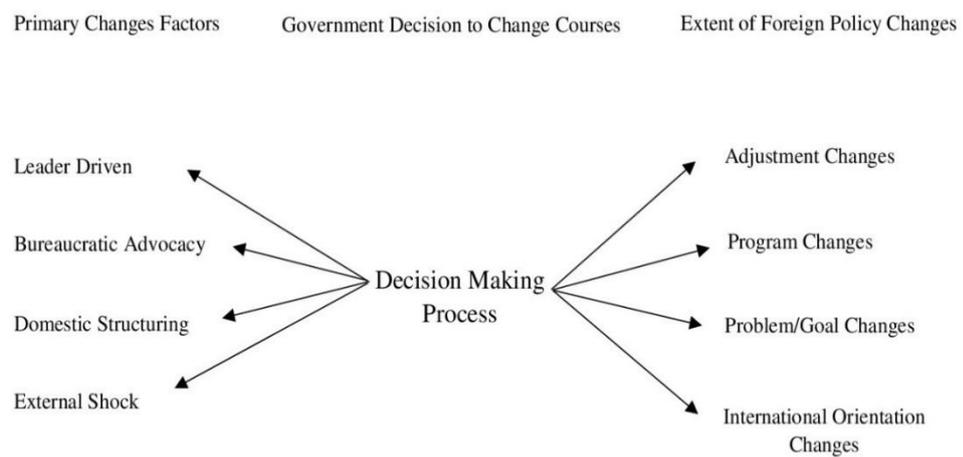
Terdapat banyak teori perubahan kebijakan luar negeri yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan lingkungan Bolsonaro. beberapa diantaranya: Pertama adalah teori Holsti. Jenis perubahan besar dalam kebijakan luar negeri, dalam bahasa Holsti, reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri, dapat dikategorikan berdasarkan perubahan signifikan dalam: (a) tingkat keterlibatan eksternal; (b) kebijakan mengenai jenis dan sumber penetrasi eksternal; (c) arah atau pola keterlibatan eksternal, dan (d) komitmen militer atau diplomatik. Atas dasar itu, Holsti kemudian mengajukan empat tipologi restrukturisasi kebijakan luar negeri, yaitu; isolasi, kemandirian, ketergantungan, dan diversifikasi non-keberpihakan (Holsti, 1982).

Kedua adalah teori Goldmann. Goldmann berpendapat bahwa ada tiga dimensi yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan luar negeri kemungkinan besar akan berubah. Pertama, adalah gelar institusionalisasi, yang berarti sejauh mana pemerintahan suatu negara telah menjadi berkomitmen untuk kebijakan luar negeri. Kedua, tingkat dukungan mengacu pada sejauh mana berbagai aktor dalam politik dalam negeri mendukung atau menentang kebijakan luar negeri pemerintah. Ketiga, tingkat arti-penting pada signifikansi isu-isu dalam perebutan kekuasaan domestik. Oleh karena itu, Goldmann menyimpulkan bahwa politik dalam negeri dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui beberapa dinamika yang berbeda. Satu, dalam perebutan kekuasaan politik dalam negeri, masalah kebijakan luar negeri menjadi pusat perhatian. Para pemimpin dan kelompok politik yang bersaing

menggunakan isu kebijakan luar negeri sebagai sarana untuk membedakan diri dari pemimpin atau kelompok lain. Dalam situasi ini, pemimpin baru yang masuk dengan kelompok pendukung baru bisa mengarah ke perubahan kebijakan luar negeri. Alternatif lain adalah bahwa pemimpin tetap tinggal tetapi memutuskan untuk mengejar kebijakan luar negeri "baru". Kedua, keyakinan dan sikap konstituen dominan berubah secara drastis. Ini bisa digunakan sebagai sumber penjelasan mengapa politik luar negeri harus diubah. Tiga, transformasi sistem politik yang terjadi dapat menimbulkan berbagai perubahan politik, termasuk di dalamnya bidang kebijakan luar negeri (Goldmann, 1988).

Hermann mengklasifikasikan empat tingkat perubahan kebijakan luar negeri yang menyertakan sejumlah indikator di dalamnya (Hermann, 1990): Pertama, *Adjustment Changes*, perubahan terjadi di tingkat usaha (besar atau kecil) dan atau dalam skope penerimaan (seperti penyaringan dalam sasaran). Apa yang dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan dan tujuan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan masih belum berubah. Kedua, *Program Changes*, perubahan dilakukan dalam metode atau caracara bagaimana tujuan dan masalah itu ditangani. Berbeda dengan adjustment changes yang sifatnya kuantitatif, program changes bersifat kualitatif dan melibatkan instrumen baru negara seperti melalui negosiasi diplomatik bukan kekuatan militer. Apa yang dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakan mengalami perubahan namun tujuan dari kebijakan luar negeri tidak berubah. Ketiga, *Problem/Goal Changes*, masalah atau tujuan awal yang ditangani digantikan atau diubah. Dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, tujuannya diganti. Keempat, *International Orientation Changes*, perubahan kebijakan luar

negeri paling ekstrem melibatkan perubahan arah seluruh orientasi aktor terhadap masalah dunia. Dibandingkan perubahan sebelumnya yang sifatnya kecil terhadap satu isu atau aktor tertentu, perubahan orientasi melibatkan perubahan mendasar peran dan aktivitas internasional. Tidak hanya satu kebijakan tetapi banyak perubahan yang simultan.



Gambar 1.1 Bagan Ide Pokok Teori Hermann
Sumber: Hermann, 1990

Hermann secara spesifik menyebut pemicu terjadinya perubahan yang juga memasukkan unsur domestik dan internasional dalam empat faktor (Hermann, 1990): Pertama, *Leader driven*, kondisi ini biasanya terjadi di negara otoriter dimana pemimpin pemerintahannya sering memaksakan kehendaknya dalam arah dasar kebijakan luar negeri. Kedua, *Bureaucratic Advocacy*, perubahan bisa saja terjadi dari sekelompok orang di dalam pemerintahan yang mengarahkan kebijakan luar negeri. Kelompok ini bisa saja berada di dalam sebuah lembaga atau menyebar

di sejumlah institusi namun mereka berinteraksi secara berkala. Ketiga, *Domestic restructuring*, istilah ini merujuk kepada segmen masyarakat yang relevan yang mendukung sebuah rejim yang memerintah dan mungkin pula segmen masyarakat ini menjadi agen perubahan. Keempat, *External shock*, pemicu ini merujuk kepada sumber perubahan kebijakan luar negeri dari peristiwa internasional yang dramatis. Sebagian dari perubahan kebijakan luar negeri hasil dari persepsi pemimpin pemerintahan terhadap beberapa perubahan di lingkungan eksternal.

Ketiga, teori Hermann. Salah satu unsur penting dalam model perubahan kebijakan luar negeri yang diajukan Hermann (1990) adalah adanya tujuh tahapan dalam perubahan kebijakan luar negeri (Hermann, 1990). Pertama, *Initial policy expectations*, perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri memasukkan ekspektasi unsur para pengambil kebijakan berkaitan dengan pengaruh yang diakibatkan oleh sebuah kebijakan baru. Kedua, *External actor/environmental stimuli*, perubahan kebijakan pada umumnya muncul dari perubahan lingkungan yang tidak diharapkan yang memberikan rangsangan baru kepada kebijakan yang ada. Ketiga, *Recognition of discrepant information*, rangsangan eksternal ini merupakan sinyal yang secara potensial menjadi umpan balik kepada pengambil kebijakan. Keempat, *Postulation of a connection between problem and policy*, jika sebuah kebijakan akan berubah langkah kritisnya adalah identifikasi hubungan sebab akibat antara masalah dan kebijakan yang ada. Kelima, *Development of alternatives*, jika pengambil kebijakan tidak dapat menemukan cara untuk mengurangi masalah maka kebijakan baru akan ditempuh. Keenam, *Building*

authoritative consensus for choice, konsensus dalam kebijakan luar negeri melibatkan lebih dari satu pengambil kebijakan.

Dari ketiga teori diatas, menurut penulis teori kebijakan Hermannlah yang paling dapat menjawab dan menjelaskan rumusan masalah terkait faktor utama pendorong perubahan kebijakan lingkungan Brazil pada masa pemerintahan Bolsonaro, terkhusus pada indikator perubahan kebijakan yang disebabkan oleh faktor *Leader Driven* dan *Bureaucratic Advocacy*. Selain itu, melihat dari sisi keberpengaruhan kebijakan domestik Brasil terhadap kebijakan luar negerinya terkait isu kebijakan lingkungan ini maka konsep *Linkage Theory* dari James N. Rosenau turut berlaku, dimana menurut Rosenau, terdapat lima sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Rosenau, 1969). Kelima sumber tersebut antara lain: (1) Sumber idiosinkretik, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri di negara yang mereka pimpin; (2) Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area; (3) Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik; (4) Sumber pemerintahan/birokrasi, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan; dan (5) Sumber peran, merupakan sumber yang berasal dari peran berdasarkan posisi dalam pemerintahan itu sendiri (Rosenau, 1969). Dari kelima sumber ini, maka Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri dapat

digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Pada kasus perubahan kebijakan luar negeri lingkungan Brasil dapat dilihat bahwa kecenderungan perubahan orientasi dari lingkungan ke ekonomi tidak terjadi serta merta sekaligus dalam satu masa pemerintahan, namun bertahap mulai dari pemerintahan Collor de Mello yang sangat mengagungkan kebijakan lingkungan, kemudian sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam beberapa masa pemerintahan Presiden setelahnya, yaitu Lula da Silva dan Dilma Rousseff, hingga secara terang-terangan berubah arah orientasi pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Tentu semua perubahan ini ada dengan turut adanya pengaruh dari berbagai sumber kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan Rosenau tersebut, diantaranya misal: Sumber idiosinkratik (kepribadian Bolsonaro), sumber pemerintahan/birokrasi (parlemen di bawah Bolsonaro) dan sumber peran pemerintahan itu sendiri (peran Bolsonaro).

Terakhir, pembahasan pada skripsi ini juga akan menerangkan alasan dari sudut pandang kapabilitas lingkungan dan sumber daya alam untuk menciptakan kemampuan dan kekuatan ekonomi di masyarakat. Dengan menggunakan paham *Natural Capitalism* yang dikemukakan oleh Amory Lovins, dapat dipahami alasan mengapa kemudian Brasil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro dan beberapa pimpinan sebelumnya begitu ambisius untuk memberdayakan Hutan Amazon sebagai aset utama perekonomian yang paling menguntungkan. *Natural Capitalism* merupakan sebuah sistem paham yang terdiri dari empat prinsip yang saling berhubungan, dimana dalam hal ini, empat prinsip tersebut berkaitan dengan

kepentingan bisnis dan lingkungan yang saling tumpang tindih, dan dimana bisnis dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya dengan lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan pada saat yang bersamaan (Amory B. Lovins, 2007). Adapun kaitan dari paham ini terhadap kajian skripsi tentang perubahan orientasi kebijakan Brasil ini adalah, paham ini akan menguak analisis-analisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan perubahan orientasi tersebut terjadi. Paham ini dapat menjelaskan dan memberikan gambaran secara umum terkait alasan mengapa Hutan Amazon bisa menjadi '*Golden Way*' bagi Presiden Bolsonaro maupun Kabinetnya untuk membelokkan orientasi kebijakan demi suatu motif ekonomi. Selain itu, paham ini juga dapat menjelaskan mengapa dampak dari perubahan agenda skala prioritas pemerintahan dari lingkungan ke ekonomi dapat menimbulkan dampak yang begitu signifikan terhadap ekonomi itu sendiri di akhir masa.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penggunaan teori kebijakan Herman untuk menjawab rumusan permasalahan pada faktor utama pendorong perubahan kebijakan lingkungan Brazil pada masa pemerintahan Bolsonaro, terkhusus pada indikator perubahan kebijakan yang disebabkan oleh faktor pimpinan dan kabinet Brasil dirasa tepat karena adanya poin-poin yang membahas tentang pengaruh dari faktor *Leader Driven* dan *Bureaucratic Advocacy* dalam pembuatan kebijakan suatu negara di dalam poin-poin Teori Hermann. Dalam hal ini, masing-masing faktor yang ada dalam Teori Hermann dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh kapasitas kepemimpinan Jair

Bolsonaro beserta Kabinetnya untuk menentukan arah orientasi kebijakan lingkungan di negaranya.

Selain itu, melihat dari sisi keberpengaruhannya kebijakan domestik Brasil terhadap kebijakan luar negerinya terkait isu kebijakan lingkungan ini maka konsep *Linkage Theory* dari James N. Rosenau turut berlaku, dimana menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain (Rosenau, 1969). Pada kasus perubahan kebijakan luar negeri lingkungan Brasil dapat dilihat bahwa kecenderungan perubahan orientasi dari lingkungan ke ekonomi tidak terjadi serta merta sekaligus dalam satu masa pemerintahan, namun bertahap mulai dari pemerintahan Collor de Mello yang sangat mengagungkan kebijakan lingkungan, kemudian sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam beberapa masa pemerintahan Presiden setelahnya, yaitu Lula da Silva dan Dilma Rousseff, hingga secara terang-terangan berubah arah orientasi pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro. Tentu semua perubahan ini ada dengan turut adanya pengaruh dari berbagai sumber kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan Rosenau tersebut, diantaranya misal: Sumber idiosinkratik (kepribadian Bolsonaro), sumber pemerintahan/birokrasi (parlemen di bawah Bolsonaro) dan sumber peran pemerintahan itu sendiri (peran Bolsonaro).

Terakhir, pembahasan pada skripsi ini juga akan menerangkan alasan dari sudut pandang kapabilitas lingkungan dan sumber daya alam untuk menciptakan kemampuan dan kekuatan ekonomi di masyarakat. Dengan menggunakan paham

Natural Capitalism yang dikemukakan oleh Amory Lovins, dapat dipahami alasan mengapa kemudian Brasil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro dan beberapa pimpinan sebelumnya begitu ambisius untuk memberdayakan Hutan Amazon sebagai aset utama perekonomian yang paling menguntungkan. Paham *Natural Capitalism* pada dasarnya menguak analisis-analisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan perubahan orientasi tersebut terjadi. Paham ini dapat menjelaskan dan memberikan gambaran secara umum terkait alasan mengapa Hutan Amazon bisa menjadi '*Golden Way*' bagi Presiden Bolsonaro maupun Kabinetnya untuk membelokkan orientasi kebijakan demi suatu motif ekonomi. Selain itu, paham ini juga dapat menjelaskan mengapa dampak dari perubahan agenda skala prioritas pemerintahan dari lingkungan ke ekonomi dapat menimbulkan dampak yang begitu signifikan terhadap ekonomi itu sendiri di akhir masa.

1.7 Hipotesis

Berubahnya kebijakan lingkungan Brazil pada era Bolsonaro disebabkan oleh agenda politik internasional Brazil serta motif ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah dengan jalan mengeksploitasi Hutan Amazon. Dalam hal ini, penulis meyakini bahwa agenda politik dan ekonomi ini telah diatur sedemikian rupa oleh kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Jair Bolsonaro untuk memberikan keuntungan yang lebih dari segi ekonomi kepada Brazil. Kebijakan ini diambil oleh kabinet dengan menanggalkan kepentingan lingkungan mereka. Ekonomi menjadi penting pada era pemerintahan Bolsonaro dikarenakan Bolsonaro melihat potensi aset ekonomi yang besar dari lahan-lahan yang dijadikan area perkebunan. Dengan probabilitas bahwa keuntungan ekonomi yang didapat akan

lebih tinggi ketimbang mempertahankan regulasi lingkungan yang ada, maka Bolsonaro memutuskan untuk mendahulukan agenda ekonomi ketimbang agenda perlindungan lingkungan yang sebenarnya sudah menjadi identitas Brazil berpuluh-puluh tahun, sebagai negara pelopor dalam bidang lingkungan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian eksplanatif untuk mencari faktor kausalitas (sebab akibat) yang mendorong perubahan kebijakan lingkungan pada masa pemerintahan Bolsonaro.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode *desk research* di 4 kota, yaitu: Semarang, Banjarmasin, Makassar dan Jakarta.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perubahan orientasi kebijakan lingkungan Brazil di era rezim Bolsonaro.

1.8.4 Jenis Sumber Penelitian

Terdapat dua jenis sumber penelitian yang dipakai oleh penulis, yang pertama adalah sumber penelitian primer yang diambil dari laporan langsung oleh pemerintah Brazil. Jenis sumber penelitian kedua yang dipakai penulis adalah jenis data sekunder, dimana penulis mengambil data dari berbagai literatur.

1.8.5 Sumber data

Penulis mengumpulkan data dari Konstitusi pemerintah Brazil, buku, jurnal, artikel, dan media massa.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kongruen untuk mencari faktor kausalitas (sebab akibat) dari perubahan kebijakan lingkungan Brazil di era pemerintahan Jair Bolsonaro. Metode kongruen menempati posisi khusus yang sangat kontributif dalam konsepsi tentang bagaimana satu kasus atau sejumlah kecil kasus dapat digunakan untuk pengembangan suatu teori (George and Bennet, 2005). Karakteristik khusus dari metode ini adalah peneliti berusaha untuk menjelaskan prediksi atau hasil dari suatu kasus dengan menganalisis kasus tersebut menggunakan sebuah teori atau konsep, yang mana hal ini sesuai dengan tipe penelitian yang dilakukan, yaitu tipe eksplanatif, dimana suatu penelitian eksplanatif berusaha menjawab pertanyaan terkait mengapa suatu permasalahan terjadi (George and Bennet, 2005).